

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**

INTISARI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

Ferdinand Alexander Padji
20310041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

PENGESAHAN INTISARI

Kupang, 18 Desember 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Filmon Mikson Polin, SH.,M.H
NIDN : 0808056902



Mathelda Naatonis, SH.,M.H
NIDN : 1516036701

MENGESAHKAN

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA
WACANA KUPANG




Dr. G. Godief Frederik Neonufa, M.T
NIDN : 0817016801

DEKAN
FAKULTAS HUKUM




Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M. Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN .ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl.Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp : (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email :ukaw@kupang.wasantara.net/id

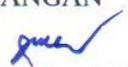
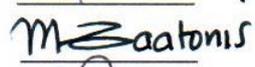
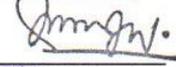
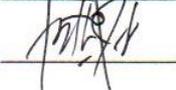
BERITA ACARA

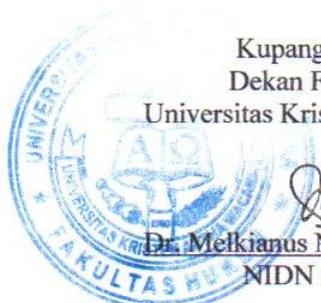
Pada hari ini, Kamis Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif, bertempat Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ferdinand Alexander Padji
NIM : 20310041
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”**

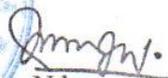
PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

- | | | |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Filmon Mikson Polin, SH.,M.H |  |
| 2. Sekretaris | : Mathelda Naatonis, SH.,M.H |  |
| 3. Anggota | : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum |  |
| | 2. Tontji Chr. Rafael, SH.,M.H |  |
| | 3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum |  |



Kupang, 18 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu ?, 2) Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu ?, 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan Negara. Dengan tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu. 2) untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu. 3) untuk mengetahui akibat hukum akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan Negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu adalah mencari dan menerima orderan, membeli blangko di media sosial, dan merubah identitas sesuai orderan. Akibat hukum terhadap pelaku adalah terdakwa di tahan, terdakwa di pidana penjara dan terdakwa membayar biaya perkara. Akibat hukum terhadap barang bukti yaitu barang bukti di rampas untuk dimusnahkan, barang bukti dirampas untuk Negara, barang bukti dikembalikan kepada pemilik dan barang bukti di pergunakan dalam perkara lain. Akibat hukum terhadap Negara yaitu Negara kehilangan pendapatan.

Kata Kunci : Motif, Modus, Akibat Hukum, Pemalsuan, Surat Tanda Nomor Kendaraan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Andi Sofyan, 2016, Nur Azisa, Hukum Pidana, Penerbit : Pustaka Pena Press, Makasar
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.
- H. Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Sleman Yogyakarta
- H. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Penerbit : Zifatama Jawa, Sidoarjo
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Airlangga University Press, Surabaya
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : PT. Rajawali Press, Depok
- Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Mandar Maju, Bandung
- Yanto M.P. Ekon, Modul Hukum Acara Pidana
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta

Sumber Jurnal :

- Haris Fakhri, Arief Wisnu Wardhana, Cahyadi, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak, *Jurnal Doctrinal*: Vol. 4 no. 1 Maret 2019, Hlm. 961-963
- I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama, *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1–Maret 2022, Hal.122
- Cahya Andika, Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan Dikabupaten Malaka, *Jurnal Lawnesia*, Volume 1 (2), Desember 2022, Hal. 140.
- Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A. T. Mokorimban, Ronny Sepang, Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Unsrat*, Hal. 3
- Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya, Farhan Saleh, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Drh), Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 21-22

Cici Indrawati, Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adha, Pengaruh Kesadaran Kelengkapan Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara Di Kelurahan Rumbih, Jurnal PEKAN Vol.7 No.2 Edisi November 2022, Hal. 91

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

